

## UPAYA PREVENTIF INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN MATERIIL PASCA AKSI DEMONSTRASI DI UPT KEIMIGRASIAN

### IMMIGRATION INTELLIGENCE PREVENTIVE EFFORTS TO PREVENT MATERIIL DAMAGE POST TO DEMONSTRATION ACTIONS AT THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF IMMIGRATION

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.458>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

**Rahel Elena Gultom**  
[elenarahel09@gmail.com](mailto:elenarahel09@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**M Vigo Ananda Patria**  
[vigopatria@gmail.com](mailto:vigopatria@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Hafiz Satria Wijaya**  
[hafizsatriaw@gmail.com](mailto:hafizsatriaw@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

#### ABSTRAK

Kerusakan material pada fasilitas pemerintah akibat demonstrasi yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan besar bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada peran intelijen keimigrasian dalam upaya preventif untuk mencegah kerusakan material dan gangguan operasional pasca aksi demonstrasi di UPT Keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi kebijakan mitigasi risiko yang lebih baik. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengkaji upaya preventif melalui analisis data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deteksi dini ancaman dan koordinasi lintas lembaga dengan aparat keamanan lokal terbukti efektif dalam mengurangi kerusakan material dan meningkatkan kesiapan operasional staf UPT. Temuan utama meliputi keberhasilan identifikasi risiko sebelum aksi massa terjadi, penurunan signifikan tingkat kerusakan fasilitas, serta peningkatan kesadaran dan responsivitas staf melalui pelatihan rutin. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem intelijen, peningkatan teknologi pemantauan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur yang ada dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif di UPT Keimigrasian. Rekomendasi penelitian ini mencakup pengembangan teknologi deteksi ancaman yang lebih canggih, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi berisiko tinggi.

**Kata Kunci:** Intelijen Keimigrasian; Demonstrasi; Deteksi Dini; Upaya Pencegahan; Mitigasi Risiko

#### ABSTRACT

*Material damage to government facilities due to uncontrolled demonstrations is one of the major challenges for the Immigration Technical Implementation Unit (UPT) in Indonesia. This study focuses on the role of immigration intelligence in preventive efforts to prevent material damage and operational disruptions after demonstrations at the Immigration UPT. The purpose of this study is to identify the preventive measures implemented, evaluate their effectiveness, and provide recommendations for better risk mitigation policies. A qualitative descriptive approach with a case study method was used to examine preventive efforts through data analysis collected from in-depth interviews, document analysis, and direct observation in the field. The results of the study indicate that early threat detection strategies and cross-agency coordination with local security forces have proven effective in reducing material damage and increasing the operational readiness of UPT staff. Key findings include successful risk identification before mass action occurs, a significant decrease in the level of facility damage, and increased staff awareness and responsiveness through routine*



*training. The implications of this study indicate that strengthening the intelligence system, improving monitoring technology, and continuous evaluation of existing procedures can significantly increase the effectiveness of preventive measures at the Immigration UPT. The study's recommendations include the development of more sophisticated threat detection technology, increased cross-agency coordination, and ongoing training for officers to improve preparedness for high-risk situations.*

**Keywords: Immigration Intelligence; Demonstration; Early Detection; Prevention Efforts; Risk Mitigation.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang diakui dalam sistem demokrasi, memberikan ruang bagi individu atau kelompok untuk menyuarakan pendapat, protes, atau ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah.<sup>1</sup> Kegiatan ini memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta mendukung prinsip partisipasi publik dalam proses demokratis. Namun, di balik pentingnya sarana untuk mengungkapkan pendapat ini, sering kali terdapat potensi dampak negatif yang dapat timbul. Tidak jarang, aksi demonstrasi yang awalnya menyampaikan aspirasi, berubah menjadi kekerasan yang mengarah pada perusakan fasilitas umum dan menimbulkan kerugian materi yang cukup signifikan. Baik masyarakat maupun instansi pemerintah yang terdampak sering kali harus menanggung konsekuensi dari kerusakan yang terjadi, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengganggu kelancaran operasional berbagai layanan publik. Dalam konteks ini, fasilitas pemerintah seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian menjadi salah satu target yang rentan terhadap kerusakan atau gangguan operasional, mengingat peran vitalnya dalam pelayanan administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memperkuat langkah-langkah preventif dan responsif guna melindungi fasilitas-fasilitas ini dari potensi ancaman yang dapat merugikan banyak pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan frekuensi demonstrasi di berbagai daerah yang berujung pada kerusakan fasilitas pemerintah, termasuk di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2023, terdapat lebih dari 15 insiden demonstrasi besar yang mengakibatkan kerusakan materiil di kantor-kantor UPT Keimigrasian di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2022, aksi demonstrasi yang berlangsung di depan UPT Keimigrasian Surabaya menyebabkan kerusakan pada pintu masuk, kaca gedung pecah, serta hilangnya beberapa dokumen penting. Aksi-aksi demonstrasi di Kantor Imigrasi juga terjadi di daerah-daerah lain, seperti pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari pada tahun 2018 hanya terdapat 7 aksi demonstrasi namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni 30 aksi demonstrasi.. Kasus-kasus ini menekankan pentingnya langkah-langkah preventif oleh intelijen keimigrasian dalam mendeteksi potensi ancaman dan memitigasi risiko sebelum terjadinya kerusakan materiil yang lebih parah.

UPT Keimigrasian yang memiliki peran vital dalam menyediakan layanan imigrasi dan pengelolaan dokumentasi resmi, memegang peranan yang sangat krusial dalam mendukung kelancaran administrasi dan mobilitas warga negara. Oleh karena itu penjagaan keamanan dan keberlangsungan operasional sangatlah penting, terutama dalam situasi yang rawan konflik, seperti saat terjadinya demonstrasi atau potensi kekacauan sosial lainnya. Gangguan terhadap operasional pada UPT Keimigrasian tidak hanya merugikan instansi tersebut, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat yang bergantung pada pelayanan imigrasi yang cepat dan aman. Kerusakan fisik pada fasilitas atau gangguan operasional dapat menghambat proses administrasi yang seharusnya berjalan dengan lancar. Kejadian tersebut menunda atau bahkan menghentikan berbagai layanan penting yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat mengganggu kepentingan banyak pihak, seperti warga negara yang membutuhkan dokumen perjalanan atau keimigrasian lainnya, serta mempengaruhi reputasi instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Karena itu penting bagi pihak berwenang untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang lebih baik serta kesiapan operasional untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan yang mungkin terjadi.

---

<sup>1</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, Avina Nakita Octavia, Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 1 (2021).

Dalam konteks menjaga keamanan dan kelancaran layanan, intelijen keimigrasian memegang peranan yang sangat penting dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul, terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat merusak fasilitas atau mengganggu operasional. Tugas utama intelijen keimigrasian adalah melakukan pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus terhadap potensi ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan fasilitas imigrasi. Pemetaan aktor-aktor yang memiliki niat atau potensi untuk melakukan tindakan yang merusak penting untuk dilakukan. Dengan adanya sistem deteksi dini yang cermat, intelijen keimigrasian dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang memungkinkan instansi terkait untuk segera merespons dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.<sup>2</sup> Informasi yang diperoleh dari intelijen akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi mitigasi yang lebih efektif, sehingga potensi kerugian materiil pada fasilitas UPT Keimigrasian dapat diminimalisir. Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan keamanan fasilitas, tetapi juga menjaga kelancaran operasional yang vital dalam memberikan layanan kepada masyarakat, memastikan bahwa proses administrasi imigrasi tetap berjalan dengan baik meskipun di tengah potensi ancaman.

Langkah preventif menjadi hal esensial dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran operasional UPT Keimigrasian. Proses pencegahan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik, seperti penguatan pengawasan dan perlindungan fasilitas, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas intelijen keimigrasian dalam memprediksi dan menganalisis situasi yang berpotensi memicu gangguan dan keamanan. Dengan adanya sistem intelijen keimigrasian yang lebih prediktif dan inovatif harapannya dapat mendeteksi potensi ancaman sebelum berkembang menjadi kerusakan besar. Instansi keimigrasian juga dapat merespons lebih cepat dan lebih efisien. Pendekatan ini memastikan bahwa kerugian yang dapat timbul akibat aksi-aksi berisiko dapat diminimalkan, sehingga operasional UPT Keimigrasian tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pencegahan yang komprehensif dapat memperkuat sistem keamanan dan mengurangi dampak negatif yang dapat merugikan baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang bergantung pada layanan imigrasi tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur terkait intelijen keimigrasian dan manajemen risiko di sektor publik. Literatur yang ada cenderung berfokus pada peran intelijen dalam konteks keamanan perbatasan dan pencegahan imigrasi ilegal. Namun, penelitian ini memperluas cakupan dengan mengkaji peran intelijen keimigrasian dalam upaya mitigasi risiko terhadap potensi kerusakan materiil akibat demonstrasi. Perspektif baru yang ditawarkan oleh penelitian ini menekankan pentingnya deteksi dini dan koordinasi lintas lembaga sebagai strategi preventif yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model evaluasi efektivitas langkah-langkah preventif melalui indikator kualitatif dan kuantitatif, yang jarang ditemukan dalam literatur manajemen risiko sektor publik di Indonesia.

Melalui studi kasus demonstrasi di UPT Keimigrasian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur yang jarang membahas penggunaan intelijen keimigrasian sebagai alat mitigasi risiko pada situasi konflik sosial. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya wacana akademis terkait intelijen keimigrasian, tetapi juga menawarkan wawasan praktis yang relevan bagi instansi pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan mitigasi risiko dan meningkatkan kesiapan operasional UPT Keimigrasian di tengah meningkatnya ancaman aksi demonstrasi.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran intelijen keimigrasian dalam upaya preventif mencegah kerusakan materiil pasca aksi pembekuan di UPT Keimigrasian?
- b. Apa saja strategi pencegahan dan upaya preventif yang diterapkan intelijen keimigrasian dalam konteks ini?

## **B. METODE PENELITIAN**

---

<sup>2</sup> Cantika F. Nakoh, Dwiki Bahtiar Soegiharto, Afsal Hilal Hamdi, Afial Yudha Mahesena, Ahmad Ibro Albaiyyin, Adam Rizky Permata Putra, Andhika Putra Asmara Kamajaya, Dandy Hernanda, Aditya Erlangga, Ahmad Amri Setyawan, Optimalisasi Kualitas Pengamanan Negara Oleh Keimigrasian Terhadap Ancaman Terorisme Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Bekasi: Pt Dewangga Energi Internasional 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya preventif yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian dalam menangani potensi risiko kerusakan fasilitas akibat aksi massa atau pembekuan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai situasi yang dihadapi oleh UPT Keimigrasian, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dan respon terhadap gangguan eksternal. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini fokus pada beberapa UPT Keimigrasian yang pernah mengalami kerusakan materiil akibat aksi kekerasan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko yang diterapkan.<sup>3</sup>

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini memanfaatkan berbagai teknik yang relevan, antara lain wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan dengan petugas intelijen keimigrasian yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam menangani ancaman terhadap fasilitas dan operasional UPT Keimigrasian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif mereka mengenai identifikasi risiko, proses pengambilan keputusan, serta efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan. Para petugas intelijen juga diminta untuk berbagi pengalaman terkait tantangan yang mereka hadapi dalam memitigasi risiko dari aksi anonimitas dan kerusakan yang terjadi di masa lalu.

Selain wawancara analisis dokumen juga dilakukan untuk mempelajari kebijakan-kebijakan preventif yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Dokumen yang mencakup pedoman operasional, peraturan keamanan, serta kebijakan mitigasi risiko yang diterapkan di UPT Keimigrasian. Dokumen-dokumen ini memberikan wawasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam menghadapi risiko kerusakan fasilitas serta untuk melindungi kelancaran operasional.

Observasi langsung dilakukan di beberapa UPT Keimigrasian untuk memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai implementasi kebijakan preventif di lapangan. Pengamatan ini fokus pada kesiapan fasilitas, infrastruktur, dan personel dalam menghadapi potensi ancaman dari aksi kekejaman. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk menyoroti bagaimana langkah-langkah keamanan diterapkan dalam situasi yang rentan, seperti pengawasan fasilitas, pengaturan akses, serta komunikasi antara petugas dan pihak eksternal. Data yang dikumpulkan melalui observasi memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana upaya preventif dilakukan pada tingkat operasional dan bagaimana petugas di lapangan merespons kondisi yang mungkin berkembang menjadi situasi darurat.

Data yang diperoleh dari metode pengumpulan ketiga data tersebut kemudian dianalisis secara tematik. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan upaya mitigasi risiko, efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan langkah-langkah pencegahan. Melalui analisis tematik, penelitian ini dapat mengelompokkan informasi berdasarkan kategori seperti strategi yang berhasil, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk memperluas mana kebijakan yang ada dapat memitigasi kerugian yang disebabkan oleh aksi massal, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, baik dari sisi kebijakan, personel, maupun infrastruktur.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai cara-cara UPT Keimigrasian mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko dari aksi pendakian. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak yang berwenang dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kebijakan dan prosedur mitigasi risiko guna melindungi fasilitas-fasilitas penting dan memastikan kelangsungan operasional di tengah potensi gangguan eksternal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran intelijen keimigrasian dalam menjaga stabilitas operasional dan keamanan fasilitas publik di masa depan.

### **C. PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), Jurnal Pendidikan Tambusai, Jil. 7 No. 1 (2023).

## **1. Peran Intelijen Keimigrasian dalam Upaya Preventif untuk Mencegah Kerusakan Materil Pasca Aksi Demonstrasi di UPT Keimigrasian**

Intelijen keimigrasian memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, terutama dalam menghadapi risiko kerusakan atau gangguan yang mungkin timbul akibat aksi protes atau demonstrasi.<sup>4</sup> Dalam upaya mencegah dampak negatif yang dapat mengganggu layanan publik, intelijen keimigrasian memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait potensi ancaman, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup> Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, termasuk media tradisional, media sosial, serta jaringan komunikasi dengan komunitas masyarakat setempat yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika yang berkembang. Melalui analisis yang mendalam, intelijen keimigrasian dapat mengevaluasi intensitas dan potensi dampak dari isu-isu yang sedang muncul, serta mengidentifikasi kelompok atau individu yang mungkin terlibat dalam aksi yang dapat merusak fasilitas atau mengganggu operasional. Informasi yang diperoleh melalui proses ini sangat berharga, karena memberikan dasar bagi UPT Keimigrasian untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat guna menjaga keamanan fasilitas dan kelancaran operasional, sehingga layanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan efisien.

Kesiapsiagaan UPT Keimigrasian sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelijen keimigrasian dalam mendeteksi ancaman sejak dini. Deteksi dini memungkinkan UPT untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi gangguan, seperti dengan memperkuat sistem pengamanan atau membatasi akses ke area-area yang kritis. Jika diperlukan, intelijen juga dapat bekerja sama dengan pihak keamanan setempat untuk menambah dukungan pengamanan. Dengan adanya persiapan yang matang, UPT Keimigrasian dapat lebih siap menghadapi situasi yang mungkin tidak terduga dan meminimalisir dampak aksi protes terhadap fasilitas dan layanan yang mereka sediakan. Langkah-langkah preventif ini menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menguntungkan bagi pelayanan publik.

Dalam menghadapi aksi pengeboran, peran intelijen keimigrasian juga meluas pada aspek perlindungan fasilitas dan dokumen penting yang ada di UPT Keimigrasian. Intelijen memastikan bahwa kawasan-kawasan strategis dilindungi secara optimal, termasuk pengawasan tambahan terhadap dokumen dan peralatan vital yang mendukung operasional.<sup>6</sup> Langkah ini dilakukan agar risiko kerusakan atau kehilangan aset berharga dapat diminimalkan. Perlindungan fasilitas ini menjadi semakin penting dalam situasi yang mungkin tidak stabil, karena kerusakan atau kehilangan dokumen imigrasi, misalnya, dapat berimplikasi serius pada layanan masyarakat dan menurunkan kredibilitas UPT Keimigrasian. Intelijen keimigrasian berfungsi memastikan bahwa kendati terjadi pariwisata, operasional tetap berjalan dengan aman dan lancar.

Evaluasi pasca aksi juga menjadi bagian yang sangat penting dalam tugas intelijen keimigrasian. Setelah setiap kejadian, intelijen keimigrasian melakukan penilaian mendalam terhadap efektivitas langkah-langkah pengamanan yang telah diterapkan selama dan setelah aksi berlangsung. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan, mengetahui area yang perlu diperbaiki, serta menyempurnakan metode pengamanan yang sudah ada agar lebih adaptif terhadap situasi yang berbeda. Selain itu, proses evaluasi ini juga berfokus pada pengembangan prosedur yang lebih baik dan lebih efisien dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan. Evaluasi yang berkelanjutan ini berfungsi sebagai alat untuk memantau dan meningkatkan kesiapan serta respons operasional dari UPT Keimigrasian terhadap potensi risiko, sekaligus memberikan masukan untuk penyesuaian kebijakan dan prosedur pengamanan. Dengan demikian, pembelajaran yang didapat dari pengalaman sebelumnya dapat diterapkan untuk memperkuat pengamanan di masa depan, memastikan UPT Keimigrasian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, dan yang paling penting, memberikan pelayanan yang aman dan terpercaya kepada masyarakat.

## **2. Strategi Pencegahan dan Upaya Preventif yang Diterapkan Intelijen Keimigrasian**

<sup>4</sup> Andi Widjajanto, Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004 (Jakarta: Pacivis, 2008).

<sup>5</sup> Dian Ayu, Muhammad Adham Pradhana, Yulian Tri Saptono, Herlina Juni Risma Saragih, I Gede Sumertha Ky, Pujo Widodo, Peran Timpora Dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing Di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 (2023).

<sup>6</sup> Arief Fahmi, Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Melaksanakan Tugas Dukungan Hukum) (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media 2021).

Intelijen keimigrasian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas operasional UPT Keimigrasian, terutama dari potensi ancaman yang timbul akibat aksi pembekuan atau protes. Salah satu langkah preventif yang diambil adalah dengan menjalin koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum, baik itu pihak kepolisian maupun tim keamanan internal UPT.<sup>7</sup> Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di sekitar fasilitas, serta memastikan dukungan keamanan yang memadai untuk mengantisipasi dan mengelola potensi kerusakan atau gangguan yang bisa terjadi. Pihak keamanan lokal juga memiliki peran penting dalam menetapkan zona aman di sekitar UPT Keimigrasian, memantau pergerakan massa yang dapat berpotensi menjadi ancaman, dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk mencegah situasi yang lebih buruk. Dengan sinergi yang terjalin antara intelijen keimigrasian dan aparat penegak hukum, langkah-langkah preventif yang lebih komprehensif dan terstruktur dapat diterapkan, guna mengurangi risiko kerusakan atau gangguan terhadap operasional dan menjaga kelancaran pelayanan publik. Sinergi ini tidak hanya memperkuat pengamanan fisik, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk menghadapi situasi krisis dengan respons yang lebih cepat dan efektif.

Selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, peningkatan keamanan fisik di UPT Keimigrasian juga menjadi salah satu langkah preventif yang penting. Intelijen keimigrasian dapat merekomendasikan pemasangan CCTV di titik-titik rawan di sekitar gedung atau fasilitas UPT, sehingga aktivitas yang mencurigakan dapat segera terpantau. Peningkatan sistem keamanan pintu dan akses masuk juga dapat membantu mengontrol siapa saja yang memasuki area sensitif, serta membatasi akses ke ruang-ruang yang menyimpan dokumen atau data penting.<sup>8</sup> Dengan langkah-langkah pengamanan yang lebih ketat, seperti penyimpanan dokumen dan data di tempat yang aman dan terlindungi, intelijen dapat memastikan bahwa informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah atau terkena dampaknya. Peningkatan keamanan fisik ini akan membuat fasilitas UPT Keimigrasian lebih sulit diakses atau dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pendekatan persuasif dan edukatif menjadi strategi penting yang digunakan oleh intelijen keimigrasian dalam mencegah kerusakan fisik pada fasilitas UPT Keimigrasian, khususnya saat menghadapi potensi ancaman dari aksi-aksi yang dapat merusak. Dalam hal ini, intelijen keimigrasian berperan untuk melakukan komunikasi langsung atau pendekatan diplomatis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi, guna memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan fasilitas publik dan menghindari kerusakan yang dapat mengganggu operasional UPT Keimigrasian.<sup>9</sup> Pendekatan ini lebih dari sekadar menekankan aspek hukum, namun juga mengutamakan dialog yang konstruktif dan saling menghargai. Dengan cara ini, pihak yang mengorganisir aksi bisa diberikan wawasan tentang dampak negatif yang mungkin timbul, sehingga mereka dapat mengarahkan anggotanya untuk menjalankan protes dengan damai tanpa merusak fasilitas publik. Pendekatan yang berbasis pada komunikasi yang terbuka ini tidak hanya akan memperkuat hubungan antara instansi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi potensi bentrokan atau konfrontasi yang bisa merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, strategi ini menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara hak untuk menyuarakan pendapat dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh intelijen keimigrasian dirancang dengan tujuan utama untuk meminimalkan segala bentuk risiko yang dapat muncul akibat potensi aksi demonstrasi, kerusuhan, atau gangguan lainnya yang dapat mengancam kelancaran operasional UPT Keimigrasian. Dengan memastikan adanya koordinasi yang erat dan sinergis antara intelijen keimigrasian dan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun pihak keamanan internal, langkah-langkah keamanan fisik yang lebih ketat dapat diterapkan di sekitar fasilitas keimigrasian, termasuk pengamanan area vital dan pengawasan intensif terhadap pergerakan massa. Selain itu, pendekatan persuasif yang dilakukan terhadap pimpinan aksi, dengan tujuan untuk menciptakan komunikasi yang konstruktif, dapat mengurangi potensi bentrokan dan kerusakan fasilitas yang dapat mengganggu proses administrasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa meskipun ada ancaman yang mengintai di sekitar UPT Keimigrasian, operasional tetap berjalan dengan lancar

---

<sup>7</sup> Robertho Sohilaht, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lutur*, Vol 4 No 1 (2023).

<sup>8</sup> Nur Najmi Laila, Manajemen Laboratorium Dalam Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Laboratorium Pendidikan (Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management 2021).

<sup>9</sup> Yehu Wangsajaya, Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxi War (Depok: Pt Rajagrafindo Persada 2023).

dan tidak terganggu, sementara fasilitas dan dokumen penting yang mendukung layanan publik tetap terlindungi dengan baik. Keberhasilan dari upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa adanya gangguan yang berarti, serta menjaga stabilitas dan ketertiban dalam pelayanan keimigrasian secara keseluruhan.

Evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan oleh intelijen keimigrasian memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dalam mengurangi risiko kerusakan. Efektivitas ini dapat dilihat dari sejumlah indikator yang menunjukkan penurunan kejadian kerusakan dan gangguan pasca pembekuan. Data dari beberapa UPT Keimigrasian yang diteliti menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kerusakan setelah penerapan langkah-langkah preventif tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan, seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum dan peningkatan keamanan fisik, telah berhasil menekan potensi kerusakan pada fasilitas dan infrastruktur yang penting bagi operasional UPT. Penurunan kerusakan ini juga menjadi bukti keberhasilan intelijen keimigrasian dalam mendeteksi dan mengatasi ancaman sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Tingkat tanggung jawab dalam penanganan ancaman juga menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah penerapan langkah-langkah preventif. Keberhasilan intelijen keimigrasian dalam mendeteksi ancaman sejak dini memungkinkan UPT Keimigrasian untuk mempersiapkan tindakan yang cepat dan tepat, sehingga fasilitas dapat terlindungi dengan baik. Ketika ancaman dapat dikelola dengan baik, operasional UPT Keimigrasian dapat kembali berjalan normal dalam waktu yang relatif singkat, meskipun situasi yang dihadapi cukup menantang. Penanggulangan ancaman yang efektif dan tepat waktu memastikan bahwa pelayanan publik di bidang keimigrasian tetap berjalan tanpa gangguan yang berarti, serta menunjukkan bahwa intelijen keimigrasian mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika yang berkembang.

Evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah pencegahan ini juga melibatkan masukan dari aparat keamanan dan staf UPT Keimigrasian. Berdasarkan umpan balik yang diterima, terjadi peningkatan signifikan dalam hal kesiapan menghadapi situasi berisiko tinggi. Staf UPT Keimigrasian dan aparat keamanan mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih aman dan siap dalam menghadapi ancaman, berkat adanya langkah-langkah pencegahan yang diterapkan oleh intelijen. Keberadaan sistem pengawasan yang lebih ketat, koordinasi yang baik dengan pihak keamanan, serta prosedur yang jelas dalam menangani situasi darurat, memberikan rasa aman yang lebih besar bagi para petugas. Umpan balik ini menjadi indikator keberhasilan yang penting dalam efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan.

Dengan demikian upaya pencegahan yang diterapkan oleh intelijen keimigrasian dapat dianggap efektif dalam mengurangi potensi kerusakan pasca pembekuan, meningkatkan responsivitas dalam menghadapi ancaman, serta mendapatkan apresiasi dari aparat keamanan dan staf internal. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga fasilitas tetap aman, tetapi juga memastikan bahwa UPT Keimigrasian dapat terus melayani masyarakat secara optimal meskipun dihadapkan pada situasi yang berisiko tinggi.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Upaya preventif yang dilakukan oleh intelijen keimigrasian idealnya harus lebih efektif dalam mengurangi potensi kerusakan materil di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian pasca aksi demonstrasi. Dengan melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang dapat timbul sejak dini, intelijen keimigrasian dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mengantisipasi ancaman yang datang, terutama yang terkait dengan potensi kerusakan fasilitas fisik maupun non fisik pasca aksi demonstrasi. Selain itu, koordinasi yang erat antara intelijen keimigrasian dan aparat keamanan lainnya dapat memperkuat efektivitas sistem keamanan di lapangan. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam mengatasi situasi yang berpotensi merusak atau mengganggu operasional fasilitas keimigrasian. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan pasca kejadian, tetapi juga memprioritaskan langkah-langkah preventif yang dapat mengurangi kerugian materil dan memastikan kelancaran layanan di UPT Keimigrasian meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.

### **2. Saran**

Intelijen keimigrasian perlu terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi pemantauan yang lebih canggih serta memperkuat hubungan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna meningkatkan responsivitas dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Dengan

dukungan teknologi yang lebih modern, intelijen keimigrasian dapat lebih efektif dalam memantau pergerakan yang mencurigakan, mendeteksi potensi risiko, dan memberikan peringatan dini yang memungkinkan tindakan preventif yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, pelatihan dan simulasi yang rutin untuk meningkatkan kesiapan pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian juga sangat disarankan, agar mereka lebih siap dalam menghadapi potensi kerusakan atau gangguan operasional yang dapat terjadi akibat aksi demonstrasi atau peristiwa lainnya. Dengan pelatihan yang intensif, pegawai UPT Keimigrasian tidak hanya dapat merespons dengan lebih baik dalam situasi darurat, tetapi juga dapat bekerja secara efektif di bawah tekanan, menjaga integritas fasilitas, dan memastikan kelancaran layanan kepada masyarakat. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan UPT Keimigrasian dalam menjaga keamanan serta memastikan bahwa fasilitas keimigrasian dapat beroperasi dengan lancar meskipun menghadapi tantangan eksternal.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Widjajanto, Artanti Wardhani, Hubungan Intelejen-Negara 1945-2004 (Jakarta: Pacivis, 2008).
- Arief Fahmi, Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Melaksanakan Tugas Dukungan Hukum) (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media 2021).
- Cantika F. Nakoh, Dwiki Bahtiar Soegiharto, Afsal Hilal Hamdi, Afial Yudha Mahesena, Ahmad Ibro Albaiyyin, Adam Rizky Permata Putra, Andhika Putra Asmara Kamajaya, Dandy Hernanda, Aditya Erlangga, Ahmad Amri Setyawan, Optimalisasi Kualitas Pengamanan Negara Oleh Keimigrasian Terhadap Ancaman Terorisme Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Bekasi: Pt Dewangga Energi Internasional 2021).
- Dian Ayu, Muhammad Adham Pradhana, Yulian Tri Saptono, Herlina Juni Risma Saragih, I Gede Sumertha Ky, Pujo Widodo, Peran Timpora Dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing Di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Marinu Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), Jurnal Pendidikan Tambusai, Jil. 7 No. 1 (2023).
- Moch. Marsa Taufiqurrohmah, Zaki Priambudi, Avina Nakita Octavia, Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 1 (2021).
- Muhammad Daffa Satria Ramadhan, Rizqi Aini Rakhman, Anak Agung I. Sri Wahyuni, Trisnowati Rahayu, Analisis Penyebab Keterlambatan Keberangkatan Kapal Di Taboneo Anchorage Banjarmasin, Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi, Jil. 3 No.1 (2024).
- Nur Najmi Laila, Manajemen Laboratorium Dalam Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Laboratorium Pendidikan (Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management 2021).
- Robertho Sohilaht, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Hukum Lutur, Vol 4 No 1 (2023).
- Yehu Wangsajaya, Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxi War (Depok: Pt Rajagrafindo Persada 2023).